

Analisis Tipologi Daerah Berdasarkan Klasifikasi Infrastruktur dan Belanja Modal di Sumatera Barat

Yogi Adi Riyanto¹, Alpon Satrianto²

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

Email : Riyantoyogi062@gmail.com¹, alponsatrianto@fe.unp.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis tipologi daerah berdasarkan PDRB perkapita terhadap infrastruktur jalan, infrastruktur listrik dan juga belanja modal. Jenis penelitian ini adalah penelitian adalah kuantitatif, dengan data yang digunakan adalah jenis data panel yaitu data gabungan dari data time-series dan data cross- section dari tahun 2016 sampai dengan 2021 yang didapatkan dari perpustakaan maupun dari lembaga dan instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah : (1) Untuk menganalisis bagaimana klasifikasi tipologi daerah menurut infrastruktur jalan terhadap PDRB perkapita tahun 2016-2018 dan tahun 2019-2021 di Sumatera barat, (2) Untuk menganalisis bagaimana klasifikasi tipologi daerah menurut infrastruktur listrik terhadap PDRB perkapita tahun 2016-2018 dan tahun 2019-2021 di Sumatera barat, dan (3) Untuk menganalisis bagaimana klasifikasi tipologi daerah menurut belanja modal terhadap PDRB perkapita tahun 2016-2018 dan tahun 2019-2021 di Sumatera barat. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa : (1) Terjadi perubahan klasifikasi tipologi daerah menurut infrastruktur jalan terhadap PDRB perkapita tahun 2016-2018 dan tahun 2019-2021 di Sumatera barat, (2) Tidak terjadi perubahan klasifikasi tipologi daerah menurut infrastruktur listrik terhadap PDRB perkapita tahun 2016-2018 dan tahun 2019-2021 di Sumatera barat, (3) Tidak terjadi perubahan klasifikasi tipologi daerah menurut belanja modal terhadap PDRB perkapita tahun 2016-2018 dan tahun 2019-2021 di Sumatera barat.

Kata kunci : *Tipologi Daerah, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik, Belanja Modal, PDRB Perkapita.*

Abstract

This study was conducted to determine the regional typology analysis of GRDP per capita on road infrastructure, electricity infrastructure and also mode expenditure. The type of this research is quantitative research, with the data used is panel data, namely combined data from time-series data and cross-sectional data from 2016 to 2021 which are obtained from libraries and from related institutions and agencies, namely the Central Statistics Agency (BPS). The analysis used in this study are: (1) To analyze how the classification of regional typology according to road infrastructure to GRDP per capita in 2016-2018 and 2019-2021 in West Sumatra, (2) To analyze how the classification of regional typology according to electricity infrastructure to GRDP per capita in 2016-2018 and 2019-2021 in West Sumatra, and (3) To analyze how the classification of regional typology according to capital expenditures on GRDP per capita in 2016-2018 and 2019-2021 in West Sumatra. The results in this study explain that: (1) There is a change in the classification of regional typology according to road infrastructure to GRDP per capita in 2016-2018 and 2019-2021 in West Sumatra, (2) There is no change

in the classification of regional typology according to electricity infrastructure to GRDP per capita in 2016-2018 and 2019-2021 in West Sumatra, (3) There is no change in the classification of regional typology according to capital expenditures to GRDP per capita in 2016-2018 and 2019-2021 in West Sumatra.

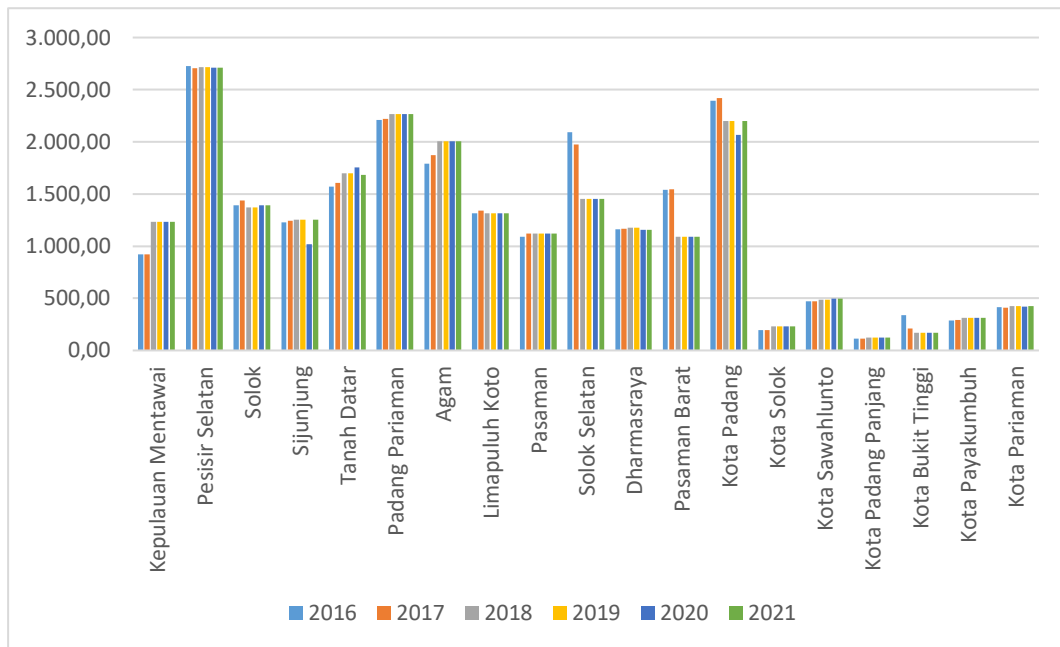
Key words : *Regional Typology, Road Infrastructure, Electricity Infrastructure, Capital Expenditure, GRDP Per capit*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan indikator dalam melihat ukuran keberhasilan suatu perekonomian di suatu wilayah. Pembangunan ekonomi diartikan secara umum sebagai kenaikan output umum barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam teori ilmu ekonomi, pembangunan dikenali bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan terjadi tradeoff. Apabila program pembangunan dititik beratkan pada pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi tetapi tidak diikuti oleh pemerataan pendapatan dan distribusi pendapatan cenderung timpang, sebaliknya jika pembangunan lebih dititikberatkan pada program pemerataan, maka distribusi pendapatan akan lebih baik, tetapi pertumbuhan ekonomi cenderung lebih rendah. (Lestari, 2021).

Sektor infrastruktur merupakan salah satu sektor vital dalam pembangunan ekonomi, sektor ini pada dasarnya merupakan sektor antara yang menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi agar dapat bergerak. Infrastruktur yang memberikan pengaruh besar pada pembangunan ekonomi dapat berupa kondisi jalan raya yang menjadi penghubung satu wilayah ke wilayah lainnya, keberadaan listrik sebagai sumber utama dalam kegiatan produksi serta akses terhadap air bersih dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dan juga belanja modal yang diberikan pemerintah guna untuk meningkatkan infrastruktur dalam menjalankan roda perekonomian daerah. (Sukwika Tatan, 2018).

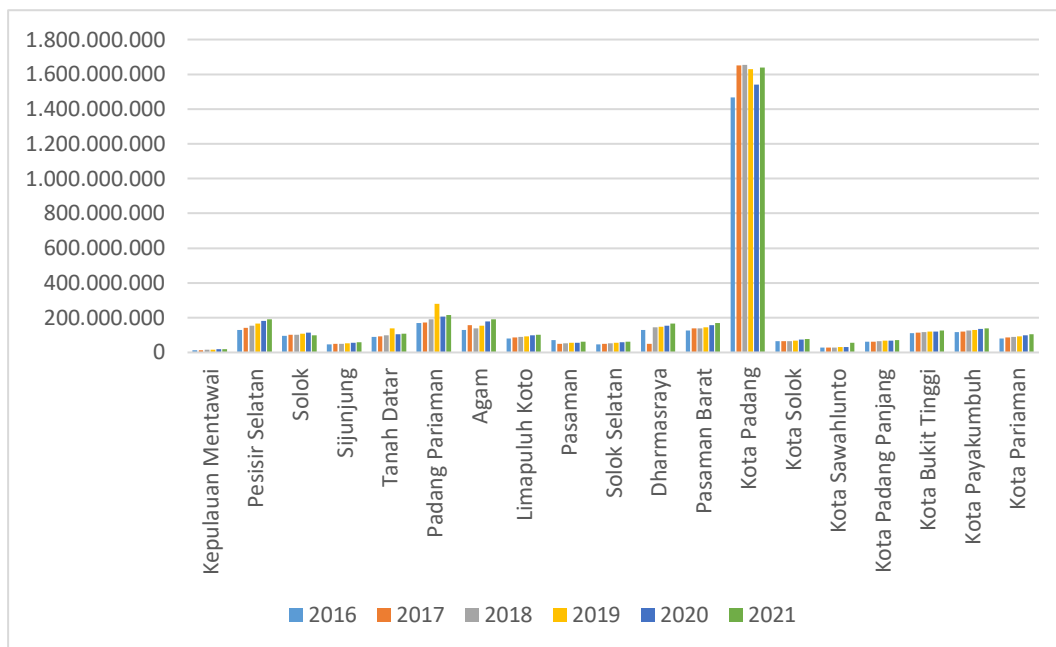
Tersedianya infrastruktur suatu daerah akan mempengaruhi pembangunan ekonomi wilayah tersebut, karena infrastruktur memiliki posisi yang sangat penting dalam keberadaan perekonomian suatu daerah tersebut sebagai pendorong produktivitas output dan melakukan kegiatan ekonomi. Maka dari itu penelitian ini akan melakukan penelitian yang terfokus pada infrastruktur air, listrik dan jalan, yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastuktur di antara lain adalah Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Jalan Air, dan Infrastruktur Irigasi. Untuk pembahasan yang digunakan dalam proposal ini adalah inftastruktur jalan, infrastruktur listrik dan juga belanja modal. Namun pembangunan infrasruktur ekonomi berupa infrastuktur jalan, dan listrik di Sumatera Barat masih belum merata, sehingga daerah yang memiliki kualitas infrastruktur yang baik akan memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah yang memiliki kualitas infrastruktur rendah. Akses yang lebih baik akan mampu mengurangi biaya hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka kesempatan bagi kaum miskin untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi (Caning dan Pedroni, 2004). Data ketersediaan infrastruktur jalan dapat di lihat dari Grafik 1.1 sebagai berikut :



Grafik 1.1 Jumlah Infrastruktur Jalan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (KM)

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Dari nilai panjang jalan menurut kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada tahun 2016-2021 seperti yang ditunjukkan pada Grafik 1.1, dapat diketahui bahwa jumlah jalan paling panjang terletak di kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata 2.7014,83 KM. dan jumlah Panjang jalan paling pendek terletak di kota Padang dengan rata-rata selama lima tahun hanya sekitar 122,00 KM pada tahun tersebut. Pada grafik 1.1 terjadi perbedaan yang cukup mencolok pada satu daerah dengan daerah lainnya. Terjadi ketimpangan infrastuktur jalan tersebut dapat dilihat dari selisih panjang jalan di setiap kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat. Dimana terdapat perbedaan yang cukup jauh pada tiap-tiap wilayah di provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya adalah jumlah infrastruktur listik yang digunakan menurut kab / kota di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2021, sebagai berikut :



Grafik 1.2 Jumlah Infrastruktur Listrik Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (KWh)

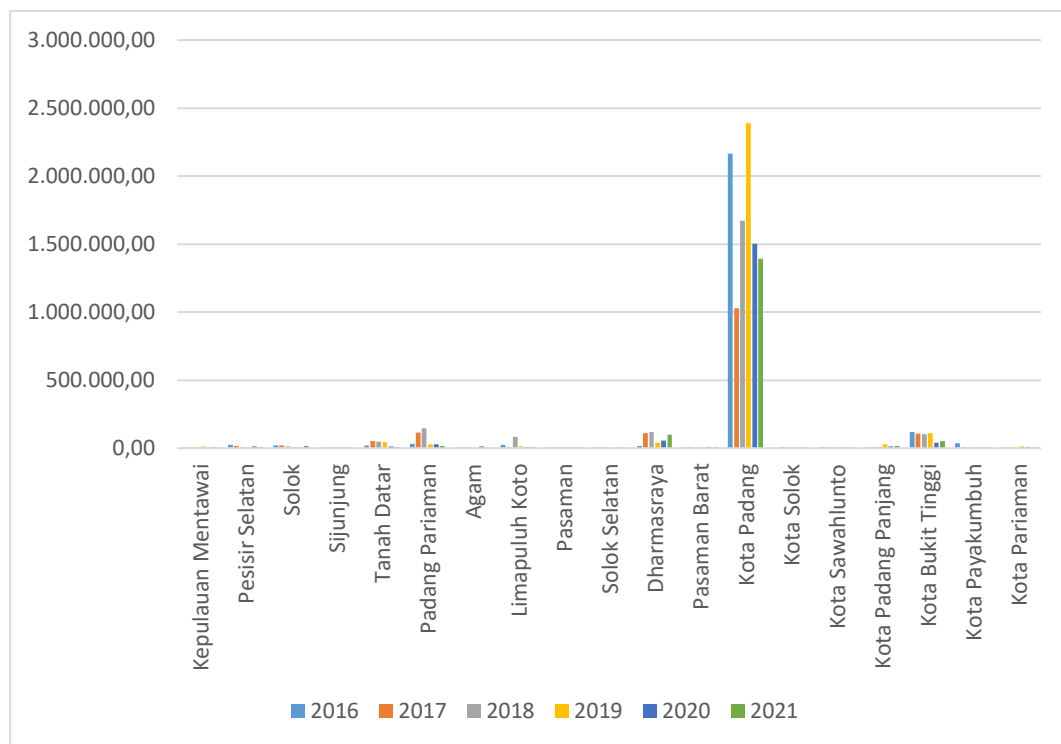
Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Dari jumlah penggunaan listrik yang terpakai menurut kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui bahwa terdapat ketimpangan yang sangat tinggi terutama pada kota Padang dengan daerah lainnya. Wilayah paling makmur terdapat di kota Padang dengan rata-rata dalam lima tahun berkisar 1.596.266.911 KWh listrik terpakai. Sementara pada wilayah lain hanya mencapai rata-rata sekitar 99.226.539 KWh listrik terpakai. Ini menandakan terjadinya ketimpangan yang sangat jauh antara satu wilayah terhadap wilayah lainnya di provinsi Sumatera Barat.

Dengan adanya jumlah perbedaan yang cukup tinggi pada infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik, maka pemerintah mau tidak mau harus melakukan pembangunan pada daerah yang memiliki infrastruktur tertinggal, sehingga akan menjadikan pemerataan secara infrastruktur pada wilayah tersebut. Dan dalam jangka panjang akan menaikkan jumlah pendapatan serta akan menjadi pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur ditinjau dari aspek kepentingan masyarakat dapat meningkatkan transformasi informasi dan kemudahan akses yang menghubungkan antar wilayah, baik antar wilayah pemerintahan pedesaan, antar pemerintahan kecamatan bahkan kemudahan akses menuju ibukota kabupaten. Mencermati betapa pentingnya infrastruktur dalam kehidupan masyarakat, disamping untuk meningkatkan pembangunan maka cukup beralasan jika setiap wilayah dibangunnya infrastruktur yang memadai.

Dengan adanya kesenjangan yang sangat signifikan, maka pemerintah Sumatera Barat melakukan adanya pemberian belanja modal ke tiap daerah di provinsi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur untuk diharapkan perekonomian di wilayah tersebut berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan pada pendapatan perkapita. Belanja modal akan memberikan dampak terhadap ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah, pemberian belanja modal pada tiap-tiap wilayah akan meningkatkan pendapatan pada wilayah tersebut jika dapat dikelola dengan maksimal. Tepatnya pembelaan modal yang dilakukan oleh pemerintah akan secara signifikan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan berpengaruh pada pembangunan

ekonomi diwilayah tersebut. Berikut adalah data belanja modal yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Barat per periode 2016-2021 (dalam ribuan rupiah).



Grafik 1.3 Jumlah Belanja Modal Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (KWh)

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah provinsi Sumatera Barat per tahun 2016-2021 juga memiliki ketimpangan yang cukup besar yang diberikan pada tiap kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Jumlah belanja modal paling tinggi berada di kota Padang dengan rata-rata 1.690.600,42 (dalam jutaan) pada 6 tahun terakhir, sementara itu untuk belanja modal dengan jumlah terkecil berada pada kabupaten Tanah Datar yang berkisar 3.452,05 (dalam jutaan pada tahun yang sama. Menurut Sutiono Feri (2018), belanja modal juga merupakan investasi pemerintah karena barang yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Apabila barang modal tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, maka belanja modal secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi dalam jangka panjang pula. Sedangkan untuk output belanja modal dalam bentuk barang publik dapat digunakan untuk mendorong efisiensi produktivitas, perdagangan, dan memperlancar akses pemerataan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat dicapai oleh suatu daerah jika daerah tersebut selalu bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di daerahnya. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni berupa peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita.

Menurut Aritonang (2006), salah satu kekurangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah pada minimnya infrastruktur yang digunakan dalam proses pembangunan tersebut. Oleh karena itu kemampuan setiap wilayah dalam menerima maupun mengelola belanja modal berbeda, hal itu disebabkan karena adanya perbedaan fasilitas yang infrastruktur yang berbeda pula. Lalu pada akhirnya perbedaan infrastruktur yang ada di tiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah dan dalam hal ini dapat di lihat dari nilai produk domestik bruto (PDRB) juga berbeda.

Indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur kesuksesan pembangunan dalam bidang ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. PDRB perkapita dapat dikatakan sebagai ukuran produktivitas wilayah yang paling umum dan paling diterima secara luas sebagai standar ukuran pembangunan dalam skala wilayah dan Negara, tidak ada satu negarapun didunia yang tidak melakukan pengukuran PDRB baik wilayah maupun perorangan. (Rustiadi, 2009). PDRB per kapita merupakan ukuran kemajuan pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya sehingga pertumbuhan pendapatan menjadi tolak ukur kemajuan pembangunan. (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu upaya untuk memperbesar pendapatan perkapita sebagai tolak ukur dalam menentukan pembangunan ekonomi yang dapat menaikkan produktifitas perkapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah keterampilan. Dengan demikian peningkatan PDRB perkapita akan menjadi faktor besar untuk mencapai pembangunan ekonomi. Berikut adalah data jumlah PDRB perkapita di provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menurut harga berlaku, seperti yang di tunjukan oleh tabel 1.1.

**Tabel 1. Jumlah PDRB Perkapita Menurut Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah)**

NO	Kab / Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kepulauan Mentawai	29.985,0 2	30.916,5 5	31.819,9 5	32.359,7 8	33.832,4 3	34.410,9 5
2	Pesisir Selatan	18.140,5 8	18.979,5 3	19.838,6 3	20.545,6 7	18.839,7 6	19.211,1 7
3	Solok	23.242,3 6	24.315,6 9	25.411,2 0	26.409,9 4	25.076,4 7	25.669,3 9
4	Sijunjung	25.758,0 4	26.667,3 1	27.573,6 4	28.178,1 7	28.523,6 0	29.046,9 3
5	Tanah Datar	24.168,1 4	25.342,3 4	26.552,4 8	27.764,7 2	25.805,6 0	26.468,3 0
6	Padang Pariaman	28.626,2 8	30.049,8 7	31.509,2 4	31.965,3 6	27.775,6 6	28.174,0 0
7	Agam	26.141,9 7	27.361,1 7	28.575,7 7	29.592,7 3	27.313,5 7	27.966,0 3
8	Limapuluh Koto	25.797,3 4	26.920,4 9	28.070,8 0	29.085,7 3	28.895,0 3	29.640,9 2
9	Pasaman	19.585,1 4	20.363,4 9	21.162,5 3	21.819,6 9	20.492,8 0	20.884,2 1
10	Solok Selatan	21.113,6 6	21.818,0 9	22.523,3 8	23.009,9 6	21.691,7 7	21.960,6 5

11	Dharmasraya	28.303,1 7	29.065,0 9	29.823,3 9	30.078,8 7	32.737,1 4	33.344,0 0
12	Pasaman Barat	23.538,6 2	24.304,9 7	25.081,0 9	25.426,3 5	26.176,3 7	26.774,8 9
13	Kota Padang	40.821,3 2	42.806,3 8	44.809,9 2	46.389,5 6	48.072,5 0	49.513,4 4
14	Kota Solok	36.253,6 9	37.623,1 0	39.078,0 1	40.130,8 8	38.795,4 1	39.436,9 2
15	Kota Sawahlunto	39.167,4 4	41.002,6 2	42.903,1 6	44.545,7 3	42.503,8 7	43.076,8 6
16	Kota Padang Panjang	42.272,8 1	44.124,3 4	46.133,0 3	47.670,6 7	45.343,4 3	46.190,4 8
17	Kota Bukit Tinggi	41.446,3 0	43.245,4 7	45.133,2 2	46.623,2 4	50.021,8 0	51.511,0 8
18	Kota Payakumbuh	29.022,1 1	30.331,2 6	31.702,0 8	32.799,6 9	31.745,2 3	32.382,7 6
19	Kota Pariaman	35.736,7 0	37.342,5 2	38.930,1 7	40.274,7 2	37.761,7 7	38.508,5 0
	Sumatera Barat	29.427,4 0	30.662,1 2	31.927,9 8	32.877,4 5	32.179,1 7	32.851,1 3

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat PDRB perkapita di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat berbeda dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam bidang ekonomi yang terus berkelanjutan. Tingkat PDRB perkapita tertinggi terdapat di kota Bukittinggi dengan 46.330,19 (dalam ribuan), selanjutnya menyusul kota Padang dengan 45.402,19 (dalam ribuan) dan kota Padang Panjang dengan 45.289,13 (dalam ribuan). Sementara PDRB perkapita pada titik terendah berada di kabupaten Pesisir Selatan yang hanya berkisar 19.259,22 (dalam ribuan) yang tak lebih dari 50% jika dibandingkan dengan PDRB perkapita kota Bukittinggi dalam rata-rata 6 tahun terakhir. Menurut Todaro (2006), semakin tidak merata pola distribusi pendapatan, semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi karena orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang-orang miskin sehingga akan meningkatkan aggregate saving rate yang diikuti oleh peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

METODE

Jenis penelitian ini di golongkan kepada penelitian kuantitatif. Untuk pengertian kuantitatif itu sendiri dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini menggunakan metode Tipologi Daerah, Tipologi Daerah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah. Tipologi Daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita pada sumbu horizontal. Berdasarkan kriteria tersebut daerah yang diamati

dapat dibagi menjadi empat daerah wilayah, diantaranya: 1) Daerah Maju 2) Daerah Berkembang, 3) Daerah Potensial, 4) Daerah Terbelakang. Untuk menentukan daerah yang cepat tumbuh dan daerah yang tertinggal dapat dilihat dengan menggunakan matrik Tipologi Daerah dengan menggunakan indikator laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita (Sjafrizal, 2012). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Data infrastruktur jalan di tiap kabupaten dan kota di Sumatera Baeat tahun 2016-2021, 2) Data infrastruktur listrik di tiap kabupaten dan kota di Sumatera Baeat tahun 2016-2021, 3) Data belanja modal di tiap kabupaten dan kota di Sumatera Baeat tahun 2016-2021, 4) Data PDRB perkapita di tiap kabupaten dan kota di Sumatera Baeat tahun 2016-2021. Adapun analisis Tipologi Daerah infrastruktur jalan, infrastruktur listrik dan belanja modal terhadap PDRB perkapita adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Klasifikasi Perhitungan Tipologi Daerah Terhadap Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik dan Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat

PDRB perkapita (Y) Infrastruktur Jalan (J) / Infrastruktur Listrik (L) / Belanja Modal (BM)	(PDRB Perkapita diatas rata-rata) Ydi>ydi	(PDRB Perkapita dibawah rata-rata) Ydi<ydi
(Jumlah diatas rata-rata) Jdi>jdi	DAERAH MAJU	DAERAH POTENSIAL
(Jumlah dibawah rata-rata) Jdi<jdi	DAERAH BERKEMBANG	DAERAH TERBELAKANG

Sumber : Analisis penulis 2022

Keterangan :

Ydi : rata-rata PDRB perkapita Kab/Kota

ydi : rata-rata PDRB perkapita Provinsi

Jdi : rata-rata infrastruktur jalan / infrastruktur listrik / belanja modal Kab/Kota

jdi : rata-rata infrastruktur jalan / infrastruktur listrik / belanja modal Provinsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Infrastruktur Jalan

Berdasarkan hasil analisis tipologi daerah jumlah rata-rata infrastruktur jalan terhadap jumlah rata-rata PDRB perkapita tahun 2016-2018 dapat disimpulkan bahwa, terdapat 1 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Maju, yaitu Kota Padang. Terdapat 6 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Berkembang, yaitu Kepulauan Mentawai, kota Solok, kota Sawahlunto, kota Padang Panjang, kota Bukittinggi, dan kota Pariaman. Terdapat 9 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Potensial, yaitu Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Koto, Solok Selatan, Pasaman Barat. Dan terdapat 3 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Terbelakang, yaitu Pasaman, Dharmasraya, dan juga kota Payakumbuh. Berikut klasifikasi menurut tipologi daerah secara rinci :

Tabel 3.1 Klasifikasi Perhitungan Tipologi Daerah Berdasarkan Infrastruktur Jalan Terhadap PDRB Perkapita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018

<div> <div>PDRB perkapita (Y)</div> <div>Infrastruktur Jalan (J)</div> </div>	(PDRB Perkapita diatas rata-rata) Ydi>ydi	(PDRB Perkapita dibawah rata-rata) Ydi<ydi
<div> <div>(Jumlah infrastruktur jalan diatas rata-rata)</div> <div>Jdi>jdi</div> </div>	DAERAH MAJU KOTA PADANG	DAERAH POTENSIAL PESISIR SELATAN, SOLOK, SIJUNJUNG, TANAH DATAR, PADANG PARIAMAN, AGAM, LIMAPULUH KOTO, SOLOK SELATAN, PASAMAN BARAT
<div> <div>(Jumlah infrastruktur jalan dibawah rata-rata)</div> <div>Jdi<jdi</div> </div>	DAERAH BERKEMBANG KEPULAUAN MENTAWAI, KOTA PADANG PANJANG, KOTA SOLOK, KOTA PARIAMAN, KOTA SAWAHLUNTO, KOTA BUKITTINGGI	DAERAH TERBELAKANG PASAMAN, DHARMASRAYA, KOTA PAYAKUMBUH

Sumber : Analisis penulis (2022)

Keterangan :

Ydi : rata-rata PDRB perkapita Kab/Kota

ydi : rata-rata PDRB perkapita Provinsi

Jdi : rata-rata infrastruktur jalan Kab/Kota

jdi : rata-rata infrastruktur jalan Provinsi

Sementara itu hasil tipologi daerah jumlah rata-rata infrastruktur jalan terhadap jumlah rata-rata PDRB perkapita tahun 2019-2021, mendapatkan hasil terdapat 2 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Maju, yaitu Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Terdapat 5 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Berkembang, yaitu kota Solok, kota Sawahlunto, kota Padang Panjang, kota Bukittinggi, dan kota Pariaman. Terdapat 7 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Potensial, yaitu Pesisir Selatan, Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Koto dan Solok Selatan. Dan terdapat 5 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Terbelakang, yaitu Sijunjung, Pasaman, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan juga kota Payakumbuh. Berikut klasifikasi menurut tipologi daerah secara rinci :

Tabel 3.2 Klasifikasi Perhitungan Tipologi Daerah Berdasarkan Infrastruktur Jalan Terhadap PDRB Perkapita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021

<div> <div>PDRB perkapita (Y)</div> <div>Infrastruktur Jalan (J)</div> </div>	(PDRB Perkapita diatas rata-rata) $Y_{di} > y_{di}$	(PDRB Perkapita dibawah rata-rata) $Y_{di} < y_{di}$
<div> <div>(Jumlah infrastruktur jalan diatas rata-rata)</div> <div>$J_{di} > j_{di}$</div> </div>	DAERAH MAJU KOTA PADANG, KEPULAUAN MENTAWAI	DAERAH POTENSIAL PESISIR SELATAN, SOLOK, TANAH DATAR, PADANG PARIAMAN, AGAM, LIMAPULUH KOTO, SOLOK SELATAN
<div> <div>(Jumlah infrastruktur jalan dibawah rata-rata)</div> <div>$J_{di} < j_{di}$</div> </div>	DAERAH BERKEMBANG KOTA PADANG PANJANG, KOTA SOLOK, KOTA PARIAMAN, KOTA SAWAHLUNTO, KOTA BUKITTINGGI	DAERAH TERBELAKANG SIJUNJUNG , PASAMAN, DHARMASRAYA, PASAMAN BARAT, KOTA PAYAKUMBUH

Sumber : Analisis penulis (2022)

Keterangan :

Y_{di} : rata-rata PDRB perkapita Kab/Kota

y_{di} : rata-rata PDRB perkapita Provinsi

J_{di} : rata-rata infrastruktur jalan Kab/Kota

j_{di} : rata-rata infrastruktur jalan Provinsi

Hasil analisis tipologi Daerah berdasarkan infrastruktur jalan terhadap PDRB perkapita di Sumatera Barat memperlihatkan bahwa wilayah di provinsi Sumatera Barat cenderung pada Daerah Berkembang dan Daerah Potensial. Daerah Potensial diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan panjang jalan provinsi Sumatera Barat karena akan mampu mengejar pertumbuhan panjang jalan kabupaten dan kota lain yang sudah maju seperti yang terlihat pada Daerah Maju. Dalam jangka panjang, kabupaten dan kota yang terdapat pada Daerah Berkembang jika tidak memperbaiki bidang infrastruktur dan aset pemerintah ditakutkan akan menjadi wilayah terbelakang karena pada Daerah Berkembang memiliki rata-rata PDRB perkapita daerah lebih tinggi dari PDRB provinsi tetapi pada rata-rata infrastruktur jalan daerah relatif lebih rendah dibanding rata-rata infrastruktur jalan provinsi.

Infrastruktur Listrik

Berdasarkan hasil analisis tipologi daerah jumlah rata-rata infrastruktur listrik terhadap jumlah rata-rata PDRB perkapita tahun 2016-2018 dapat disimpulkan bahwa, terdapat 1 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Maju, yaitu Kota Padang. Terdapat 6 kabupaten dan kota yang berada pada

Daerah Berkembang, yaitu Kepulauan Mentawai, kota Padang Panjang, kota Solok, kota Pariaman, kota Sawahlunto, dan kota Bukittinggi. Terdapat 1 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Potensial, yaitu kabupaten Padang Pariaman. Dan terdapat 11 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Terbelakang, yaitu Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Sijunjung, Tanah Datar, Agam, Limapuluh Koto, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat dan juga kota Payakumbuh. Berikut klasifikasi tipologi daerah secara rinci :

Tabel 3.3 Klasifikasi Perhitungan Tipologi Daerah Berdasarkan Infrastruktur Listrik Terhadap PDRB Perkapita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018

PDRB perkapita (Y) Infrastruktur Listrik (L)	(PDRB Perkapita diatas rata-rata) Ydi>ydi	(PDRB Perkapita dibawah rata-rata) Ydi<ydi
(Jumlah infrastruktur listrik diatas rata-rata) Ldi>ldi	DAERAH MAJU KOTA PADANG	DAERAH POTENSIAL PADANG PARIAMAN
(Jumlah infrastruktur listrik dibawah rata-rata) Ldi<ldi	DAERAH BERKEMBANG KEPULAUAN MENTAWAI, KOTA PADANG PANJANG, KOTA SOLOK, KOTA PARIAMAN, KOTA SAWAHLUNTO, KOTA BUKITTINGGI	DAERAH TERBELAKANG PESISIR SELATAN, SOLOK, SIJUNJUNG, TANAH DATAR, AGAM, LIMAPULUH KOTO, PASAMAN, DHARMASRAYA, SOLOK SELATAN, PASAMAN BARAT, KOTA PAYAKUMBUH

Sumber : Analisis penulis (2022)

Keterangan :

Ydi : rata-rata PDRB perkapita Kab/Kota

ydi : rata-rata PDRB perkapita Provinsi

Ldi : rata-rata infrastruktur listrik Kab/Kota

ldi : rata-rata infrastruktur listrik Provinsi

Sementara itu, hasil tipologi daerah jumlah rata-rata infrastruktur listrik terhadap jumlah rata-rata PDRB perkapita tahun 2019-2021 memiliki hasil yang sama pada tipologi daerah 3 tahun sebelumnya, yaitu terdapat 1 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Maju, yaitu Kota Padang. Terdapat 6 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Berkembang, yaitu Kepulauan Mentawai, kota Padang Panjang, kota Solok, kota Pariaman, kota Sawahlunto, dan kota Bukittinggi. Terdapat 1 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Potensial, yaitu kabupaten Padang Pariaman. Dan terdapat 11 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Terbelakang, yaitu Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Sijunjung, Tanah Datar, Agam, Limapuluh Koto, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat dan juga kota Payakumbuh. Berikut klasifikasi tipologi daerah secara rinci :

Tabel 3.4 Klasifikasi Perhitungan Tipologi Daerah Berdasarkan Infrastruktur Listrik Terhadap PDRB Perkapita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021

<div> <div>PDRB perkapita (Y)</div> <div>Infrastruktur Listrik (L)</div> </div>	(PDRB Perkapita diatas rata-rata) $Y_{di} > y_{di}$	(PDRB Perkapita dibawah rata-rata) $Y_{di} < y_{di}$
(Jumlah infrastruktur listrik diatas rata-rata) $L_{di} > l_{di}$	DAERAH MAJU KOTA PADANG	DAERAH POTENSIAL PADANG PARIAMAN
(Jumlah infrastruktur listrik dibawah rata-rata) $L_{di} < l_{di}$	DAERAH BERKEMBANG KEPULAUAN MENTAWAI, KOTA PADANG, PANJANG, KOTA SOLOK, KOTA PARIAMAN, KOTA SAWAHLUNTO, KOTA BUKITTINGGI	DAERAH TERBELAKANG PESISIR SELATAN, SOLOK, SIJUNJUNG, TANAH DATAR, AGAM, LIMAPULUH KOTO, PASAMAN, DHARMASRAYA, SOLOK SELATAN, PASAMAN BARAT, KOTA PAYAKUMBUH

Sumber : Analisis penulis (2022)

Keterangan :

Y_{di} : rata-rata PDRB perkapita Kab/Kota

y_{di} : rata-rata PDRB perkapita Provinsi

L_{di} : rata-rata infrastruktur listrik Kab/Kota

l_{di} : rata-rata infrastruktur listrik Provinsi

Hasil analisis tipologi Daerah infrastruktur listrik terhadap PDRB perkapita di provinsi Sumatera Barat menunjukkan hasil bahwa mayoritas daerah terletak pada Daerah Berkembang dan Daerah Terbelakang. Daerah Berkembang adalah daerah dengan wilayah tertekan dimana jumlah rata-rata infrastruktur yang berada pada daerah masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah rata-rata infrastruktur provinsi sementara rata-rata PDRB perkapita daerah masih lebih besar ketimbang rata-rata PDRB perkapita provinsi. Sementara itu pada Daerah Terbelakang yang menjadi sektor tertinggal menurut analisis tipologi Daerah adalah Wilayah yang memiliki rata-rata PDRB perkapita daerah dan rata-rata infrastruktur listrik daerah lebih rendah dibanding rata-rata PDRB perkapita provinsi dan rata-rata infrastruktur listrik provinsi.

Kabupaten dan Kota yang berada pada Daerah Potensial adalah wilayah yang diharapkan maju dimana wilayah tersebut memiliki jumlah rata-rata infrastruktur listrik daerah lebih besar daripada rata-rata infrastruktur listrik provinsi, tetapi laju PDRB perkapita daerah lebih rendah dibanding laju PDRB provinsi. Wilayah tersebut adalah kabupaten Padang Pariaman. Hal ini jika dapat dimaksimalkan maka akan meningkatkan PDRB perkapita sehingga akan menjadi wilayah yang berada pada Daerah Maju. Wilayah yang berada pada Daerah Maju adalah wilayah yang memiliki rata-rata infrastruktur listrik daerah lebih besar daripada rata-rata infrastruktur listrik provinsi, dan laju PDRB perkapita

daerah lebih tinggi dibanding laju PDRB provinsi. Wilayah yang berada pada Daerah Maju adalah Kota Padang.

Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis tipologi daerah rata-rata belanja modal terhadap rata-rata PDRB perkapita 2016-2018. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Maju, yaitu kota Padang. Terdapat 5 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Berkembang, yaitu Kepulauan Mentawai, kota Padang Panjang, kota Solok, kota Bukittinggi, kota Pariaman dan kota Sawahlunto. Terdapat 0 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Potensial. Dan terdapat 12 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Terbelakang, yaitu Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Koto, Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Dharmasraya dan kota Payakumbuh. Untuk analisis lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Klasifikasi Perhitungan Tipologi Daerah Berdasarkan Belanja Modal Terhadap PDRB Perkapita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018

PDRB perkapita (Y) Belanja Modal (BM)	(PDRB Perkapita diatas rata-rata) Ydi>ydi	(PDRB Perkapita dibawah rata-rata) Ydi<ydi
(Jumlah belanja modal diatas rata-rata) BMdi>bmdi	DAERAH MAJU KOTA PADANG	DAERAH POTENSIAL
(Jumlah belanja modal dibawah rata-rata) BMdi<bmdi	DAERAH BERKEMBANG KEPULAUAN MENTAWAI, KOTA PADANG PANJANG, KOTA SOLOK, KOTA PARIAMAN, KOTA BUKITTINGGI, KOTA SAWAHLUNTO,	DAERAH TERBELAKANG PESISIR SELATAN, SOLOK, SIJUNJUNG, TANAH DATAR, PADANG PARIAMAN, AGAM, LIMAPULUH KOTO, SOLOK SELATAN, PASAMAN BARAT, PASAMAN, DHARMASRAYA, KOTA PAYAKUMBUH

Sumber : Analisis penulis 2022

Keterangan :

Ydi : rata-rata PDRB perkapita Kab/Kota

ydi : rata-rata PDRB perkapita Provinsi

BMdi : rata-rata belanja modal Kab/Kota

bmdi : rata-rata belanja modal Provinsi

Sementara itu, hasil tipologi daerah jumlah rata-rata belanja modal terhadap jumlah rata-rata PDRB perkapita tahun 2019-2021 memiliki hasil yang sama pada tipologi daerah 3 tahun sebelumnya,

yaitu terdapat 1 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Maju, yaitu kota Padang. Terdapat 5 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Berkembang, yaitu Kepulauan Mentawai, kota Padang Panjang, kota Solok, kota Bukittinggi, kota Pariaman dan kota Sawahlunto. Terdapat 0 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Potensial. Dan terdapat 12 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Terbelakang, yaitu Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Koto, Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Dharmasraya dan kota Payakumbuh. Untuk analisis lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Klasifikasi Perhitungan Tipologi Daerah Berdasarkan Belanja Modal Terhadap PDRB Perkapita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021

PDRB perkapita (Y) Belanja Modal (BM)	(PDRB Perkapita diatas rata-rata) Ydi>ydi	(PDRB Perkapita dibawah rata-rata) Ydi<ydi
(Jumlah belanja modal diatas rata-rata) BMdi>bmdi	DAERAH MAJU KOTA PADANG	DAERAH POTENSIAL
(Jumlah belanja modal dibawah rata-rata) BMdi<bmdi	DAERAH BERKEMBANG KEPULAUAN MENTAWAI, KOTA PADANG PANJANG, KOTA SOLOK, KOTA PARIAMAN, KOTA SAWAHLUNTO, KOTA BUKITTINGGI	DAERAH TERBELAKANG PESISIR SELATAN, SOLOK, SIJUNJUNG, TANAH DATAR, PADANG PARIAMAN, AGAM, LIMAPULUH KOTO, SOLOK SELATAN, PASAMAN BARAT, PASAMAN, DHARMASRAYA, KOTA PAYAKUMBUH

Sumber : Analisis penulis 2022

Keterangan :

Ydi : rata-rata PDRB perkapita Kab/Kota

ydi : rata-rata PDRB perkapita Provinsi

BMdi : rata-rata belanja modal Kab/Kota

bmdi : rata-rata belanja modal Provinsi

Hasil kategorisasi berdasarkan tipologi Daerah PDRB perkapita dan jumlah belanja moda, hasil analisis tipologi Daerah memperlihatkan bahwa wilayah di provinsi Sumatera Barat cenderung berada pada Daerah Potensial. Daerah Potensial adalah memiliki rata-rata PDRB perkapita daerah lebih rendah dari PDRB provinsi tetapi pada rata-rata belanja modal daerah lebih tinggi dibanding rata-rata belanja modal provinsi. Sementara itu daerah yang berada pada Daerah Terbelakang dianggap sebagai daerah yang tertinggal karena memiliki tingkat rata-rata PDRB perkapita daerah lebih rendah dari rata-

rata PDRB provinsi serta rata-rata belanja modal daerah juga lebih rendah dari rata-rata belanja modal provinsi.

Daerah Berkembang memiliki rata-rata PDRB perkapita daerah lebih tinggi dari PDRB provinsi tetapi pada rata-rata belanja modal daerah relatif lebih rendah dibanding rata-rata belanja modal provinsi. Sementara pada Daerah Maju memiliki Daerah Berkembang memiliki rata-rata PDRB perkapita daerah lebih tinggi dari PDRB provinsi dan rata-rata belanja modal daerah lebih tinggi dibanding rata-rata belanja modal provinsi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis tipologi daerah, infrastruktur jalan terhadap PDRB perkapita. Pada klasifikasi tahun 2016-2018 memiliki hasil terdapat 1 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Maju, terdapat 6 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Berkembang, terdapat 9 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Potensial, dan terdapat 3 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Terbelakang. Sementara pada tahun 2019-2021 mendapatkan hasil terdapat 2 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Maju, terdapat 5 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Berkembang, terdapat 7 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Potensial, dan terdapat 5 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Terbelakang. Hasil analisis tipologi daerah berdasarkan infrastruktur jalan terhadap PDRB perkapita tahun analisis 2016-2018 dan tahun analisis 2019-2021. Terjadi perubahan kepada Kepulauan Mentawai dari daerah berkembang ke daerah maju, serta terjadi perubahan kepada kabupaten Pasaman Barat dan Sijunjung dari daerah potensial ke daerah terbelakang, sementara untuk kabupaten dan kota lainnya tidak mengalami perubahan. Hasil analisis tipologi daerah, infrastruktur listrik terhadap PDRB perkapita, pada analisis tahun 2016-2018 dan tahun 2019-2021 tidak ada mengalami perubahan. Hasil analisis ini mendapatkan hasil terdapat 1 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Maju, terdapat 6 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Berkembang, terdapat 1 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Potensial, dan terdapat 11 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Terbelakang.

Menurut hasil analisis tipologi daerah, belanja modal terhadap PDRB perkapita. Pada klasifikasi tahun 2016-2018 dan tahun 2019-2021 tidak ada mengalami perubahan. Hasil analisis ini mendapatkan hasil terdapat 1 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Maju, terdapat 5 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Berkembang, terdapat 0 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Potensial, dan terdapat 12 kabupaten dan kota yang berada pada Daerah Terbelakang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, 2006. Kebijakan Investasi Sebagai bagian Pembangunan Nasional
- Ardana, Y. (2018). Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 69–78. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i1.2154>
- Cakrawijaya, M. A. (2013). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Terhadap Perkembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Studi Kasus : Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 25(2), 137–156. <file:///C:/Users/Wike/Downloads/08---bab2.pdf>
- Canning, D. & Pedroni, P. 2004. *The Effect of Infrastructure on Long Run Economic Growth*. JEL Classifications: O1. H4
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta. (2009). *Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)*.
- Dwi Putra Santoso, F., & Mukhlis, I. (2021). Ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal*

- Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(2), 146–162. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p146-162>
- Ginting, A. M., & Dewi, G. P. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor Keuangan terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 117–130. jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/167/112
- Indriana, R. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti Tahun 2016. *UIN Suska Riau*, 53(9), 1689–1699.
- Kurniawati, S., & Asyurrahman. (2018). Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP*, 127–143.
- Lestari, M., & Suhadak. (2019). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi Indonesia (Studi Pada Badan Pusat Statistik Tahun 2003-2017). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 70(1), 98–105.
- Rambe, S. S. U., Iskandar, D. A., Magister, M., Wilayah, P., Mada, U. G., No, J. G., Mlati, K., Sleman, K., No, J. G., Mlati, K., & Sleman, K. (2021). *Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sleman (the Role of Road Infrastructure Expenditure on Economic Growth in Sleman District)*. 3, 88–96.
- Rustiadi. Ernan, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta
- Siallagan, D. Y. S. (2019). Analisis Determinan Ketimpangna Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2017. *Skripsi*, 2006, 17. <http://repository.unsil.ac.id/625/>
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Sutiono, F. (2018). PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TIMUR (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(2).
- Todaro, M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta